

**ANALISIS PENGARUH BANTUAN SOSIAL DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
KEMISKINAN DI KOTA TEGAL
TAHUN 2010-2019**



TUGAS AKHIR

OLEH :

AKHMAD TEGUH ARIFIN

NIM 18031205

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul:

ANALISIS PENGARUH BANTUAN SOSIAL DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA TEGAL TAHUN 2010 –
2019.

Oleh mahasiswa :

Nama : Akhmad Teguh Arifin

NIM : 18031205

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, Juli 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Hesti Widianti, SE, M.Si
NIPY. 08.009.043



Anita Karunia, SE, M.Si
NIPY. 09.015.242

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir yang berjudul :

ANALISIS PENGARUH BANTUAN SOSIAL DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA TEGAL TAHUN 2010-
2019.

Oleh :

Nama : Akhmad Teguh Arifin

NIM : 18031205

Program study : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 4 Agustus 2021

1. Hesti Widianti, SE, M.Si

Ketua Penguji



2. Ririh Sri Harjanti, SE, MM, CTT

Penguji I



3. Fitri Amaliah, SE, M.Ak

Penguji II



Mengetahui

Ketua Program Studi



Yeni Priatana Sari, SE, M.Si, Ak, Ca

NIPY. 009.011.062

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PENGARUH BANTUAN SOSIAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA TEGAL TAHUN 2010 – 2019” beserta isinya adalah benar-benar hasil karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutip dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam kode etik ilmiah. Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan dari saya siap menanggung segala resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya.

Tegal, Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



Akhmad Teguh Arifin

NIM. 18031205

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai mahasiswa Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, saya yang bertanda tangan bawah ini,

Nama : Akhmad Teguh Arifin

NIM :18031205

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui memberikan kepada Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, Hak Bebas Royalty Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Righth*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “ANALISIS PENGARUH BANTUAN SOSIAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA TEGAL TAHUN 2010-2019“. Dengan Hak Bebas Royalty Non-eksklusif , Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih mediakan atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta, dengan menetapkan prinsip-prinsip, etika dan atauran hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi, saya bersedia untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta atau plagiatisme dalam karya ilmiah ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Akhmad Teguh Arifin

NIM.18031205

HALAMAN MOTTO

- ❖ Jangan Terlalu Ambil Hati Dengan Ucapan Seseorang, Kadang Manusia Punya Mulut Tapi Belum Tentu Punya Pikiran (Albert Einstein).
- ❖ Musuh Yang Paling Berbahaya Di Atas Dunia Adalah Penakut Dan Bimbang. Teman Yang Paling Setia, Hanyalah Keberanian Dan Keyakinan yang Teguh (Andrew Jakson).
- ❖ Ikuti Pasionmu, Itu Akan Menuntunmu Ke Tujuanmu (Oprah Winrey)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Orang tuaku yang senantiasa mendukung dan selalu mendoakan.
- ❖ Seluruh kaka-kaka saya yang selalu memberi motivasi dan dukungan.
- ❖ Sahabat Sejati (Sdr. Usamah) yang sudah meminjamkan notebook yang digunakan untuk pengerjaan Laporan PKL sampai Tugas Akhir ini.
- ❖ Teman-teman di kampung yang setia kawan.
- ❖ Teman-teman seprodi yang tidak sombong dan baik hati.
- ❖ Dosen pembimbing (Ibu Hesti dan ibu Anita) yang sangat membantu dalam menyusun Tugas akhir, memberikan bimbingan dengan sabar walaupun dalam situasi pandemi Covid-19 ini beliau sangat semangat dan antusias dalam melakukan bimbingan agar terselesaikannya Tugas Akhir ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “ Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kota Tegal tahun 2010-2019”.

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan Kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan tugas akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Nizar Suhendra, SE, MPP, selaku direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Ibu Yeni Pritna Sari, SE, M.Si, Ak, CA, sebagai Ka.Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Ibu Hesti Widianti, SE, M.Si, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas akhir ini.
4. Ibu Anita Karunia, SE, M.Si, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Badan Pusat Statistik Tegal yang telah menyediakan data untuk penelitian Tugas Akhir ini.
6. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) yang telah menyediakan data untuk penelitian Tugas Akhir ini.
7. Teman-teman baik di rumah dan kampus, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung turut membuat terselesainya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca serta pemerhati masalah akuntansi pada umumnya.

Tegal, Juli 2021

Akhmad Teguh Arifin

NIM.18031205

ABSTRAK

Akhmad Teguh Arifin. 2021. *Analisis Pengaruh Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kota Tegal Tahun 2010-2019*. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Hesti Widiyanti, S.E., M.Si; Pembimbing II: Anita Karunia, S.E., M.Si.

Salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan adalah penurunan tingkat kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kota Tegal dengan menggunakan data sekunder tahunan dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data adalah kuantitatif dengan Uji Asumsi klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis, dan Koefisien Determinasi dengan alat analisis eviews 9. Hasil perhitungan variabel bantuan sosial diperoleh nilai koefisien regresi 0,097784 dan nilai probabilitas $0,0012 < 0,05$ yang berarti bantuan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai koefisien $-0,244309$ dan nilai probabilitas $0,4875 > 0,05$ yang berarti pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan yang berarti bahwa penyaluran bantuan sosial masih belum efektif dalam menurunkan kemiskinan di Kota Tegal. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan yang berarti pertumbuhan ekonomi tidak efektif dalam menurunkan kemiskinan di Kota Tegal.

Kata Kunci : Bantuan Sosial, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan

ABSTRACT

Arifin, Akhmad Teguh. 2021. *Analysis of the Effect of Social Assistance and Economic Growth on Poverty at Tegal City in 2010-2019.* Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Hesti Widiyanti, S.E., M.Si; Co-Advisor: Anita Karunia, S.E., M.Si.

One indicator of the success of development is poverty reduction. The problem of poverty is a complex and multidimensional problem. This study aims to determine the effect of social assistance and economic growth on poverty in Tegal city using annual secondary data from 2010 to 2019. Data collection method used was documentation. The data analysis technique was quantitative with Classical Assumption Test, Multiple Linear Regression Analysis, Hypothesis Testing, and Coefficient Determination using the Eviews 9 analysis tool. The results of the calculation of the social assistance variable obtained a regression coefficient value of 0,097784 and a probability value of 0,0012 < 0,05 which mean that social assistance has a positive and significant effect on poverty. Economic growth variables obtained a regression coefficient value of -0,244309 and a probability value of 0,4875 > 0,05 which mean that economic growth has no effect on poverty. The conclusion of the research showed that Social assistance has a positive and significant effect on poverty which means that the distribution of social assistance is still not effective in reducing poverty in Tegal City. Economic growth has no effect on poverty which means that economic growth is not effective in reducing poverty in Tegal City.

Keyword : *Social Assistance, Economic Growth, Poverty*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Batasan Masalah	8
1.6 Kerangka Berpikir	8
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kemiskinan.....	12
2.1.1 Definisi kemiskinan.....	12
2.1.2 Penyebab Kemiskinan.....	13
2.1.3 Ukuran Kemiskinan	17
2.2 Pertumbuhan Ekonomi	19
2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	19

2.2.2	Ukuran Pertumbuhan Ekonomi	21
2.2.3	Hubungan Pertumbuhan ekonomi Dengan Kemiskinan	23
2.3	Bantuan Sosial	24
2.3.1	Perlindungan Sosial	24
2.3.2	Bantuan Sosial	28
2.4	Hipotesis Penelitian	32
2.5	Penelitian Terdahulu	34
BAB III	METODE PENELITIAN	37
3.1	Lokasi Penelitian	37
3.2	Waktu Penelitian	37
3.3	Jenis Data	37
3.4	Sumber Data	37
3.5	Teknik Pengumpulan Data	38
3.6	Defnisi Operasional Variabel	38
3.7	Analisis Data	39
3.7.1	Uji Asumsi Klasik	39
3.7.2	Analisis Regresi Linier Berganda	42
3.7.3	Uji Hipotesis	42
3.7.4	Koefisien Determinasi	43
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1	Hasil Penelitian	44
4.1.1	Gambaran Umum Kota Tegal	44
4.1.2	Kemiskinan di Kota Tegal	46
4.1.3	Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tegal	48
4.1.4	Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Kota Tegal	50
4.1.5	Hasil Analisis Data	51
4.1.5.1	Uji Asumsi Klasik	51
4.1.5.2	Analisis Regresi Linier Berganda	54
4.1.5.3	Uji Hipotesis	57
4.1.5.4	Uji Koefisien Determinasi	58
4.2	Pembahasan	59

4.2.1 Pengaruh Bantuan Sosial Terhadap kemiskinan.....	59
4.2.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap kemiskinan.....	60
4.2.3 Pengaruh Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

2.1	Penelitian Terdahulu.....	34
4.1	Wilayah Administratif Kota Tegal	46
4.2	Peresentase Kemiskinan di Kota Tegal Tahun 2010-2019.....	47
4.3	Persentase Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tegal Tahun 2010-2019.....	49
4.4	Belanja Bantuan Sosial pada realisasi APBD Kota Tegal.....	50
4.5	Hasil Uji Multikolinieritas	52
4.6	Hasil Uji Autokorelasi	53
4.7	Hasil Uji Heteroskedasitas.....	54
4.8	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	55
4.9	Hasil Uji f	57
4.10	Hasil Uji t	58

DAFTAR GAMBAR

1.1 Kerangka Berpikir.....	9
4.1 Peta Kota Tegal.....	45
4.2 Hasi Uji Normalitas	51

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Penelitian	66
2. Uji Normalitas.....	66
3. Uji Multikolinieritas.....	67
4. Uji autokorelasi.....	67
5. Uji Heteroskedasitas	68
6. Analisis Regresi Linier Berganda	68
7. Hasil Uji f	68
8. Hasil Uji t.....	69
9. Kemiskinan di Kota Tegal Tahun 2010-2019.....	69
10. Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tegal Tahun 2010-2019	70
11. Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada APBD Kota Tegal Tahun 2010-2019	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang, dari awal merdeka sampai dengan saat ini Indonesia mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Hal ini tak luput dari berbagai pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada hakikatnya pembangunan adalah proses perubahan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses yang multidimensial mencakup berbagai perubahan struktur di segala sektor. Sebagai suatu proses, pembangunan tentu saja dilakukan dengan melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada juga merespon perubahan yang terjadi dalam masyarakat, dan tuntutan-tuntutan pergeseran waktu akibat berkembangnya peradaban, sistem sosial kemasyarakatan, dan teknologi yang lebih maju. Sesuai dengan salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat berbagai upaya terus dilakukan diantaranya dengan pembangunan ekonomi. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah penurunan tingkat kemiskinan. Efektifitas dalam penurunan tingkat kemiskinan merupakan salah satu strategi atau instrumen keberhasilan dari pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satu kriteria utama sektor pembangunan nasional adalah penurunan tingkat kemiskinan.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Fenomena seperti ini terjadi dikarenakan rendahnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok baik papan, sandang, maupun pangan dan juga rendahnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Kemampuan pendapatan yang rendah juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan dan standar pendidikan. Masalah kemiskinan sering terjadi di negara berkembang yang memiliki tingkat jumlah penduduk yang tinggi sehingga terjadi ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat yang dapat memicu terjadi ketimpangan sosial. Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensial. Oleh karena itu, upaya dalam pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup segala aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

Masalah kemiskinan terus menjadi masalah besar yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami kecenderungan menurun setiap tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), (2021)^[1]. Secara umum, pada periode 2010 sampai September 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013 dan Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah

dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.

Adanya penurunan tingkat kemiskinan di suatu daerah adalah keberhasilan dari pembangunan. Pembangunan ekonomi dapat diukur dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah permasalahan jangka panjang yang dihadapi oleh suatu Negara dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional riil. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur seberapa besar keberhasilan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mengalami penambahan jumlah dan kualitas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sukirno (2000)^[2] dalam analisis makro menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai oleh suatu negara. Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu dibutuhkan pertumbuhan ekonomi serta distribusi pendapatan yang optimal. Masalah pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tergantung dari banyak faktor, salah satunya adalah kebijakan dari pemerintah karena pada suatu daerah harus mengenali dan mengidentifikasi secara tepat agar dapat meningkatkan laju pertumbuhan

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tiap sektor menggambarkan pada masing-masing sektor atau dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan. Kriteria utama keberhasilan pembangunan daerah adalah dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara sektoral maupun perkapita. Dalam skala regional, pertumbuhan ekonomi dihitung dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode pembangunan tertentu, baik secara riil maupun secara nominal.

Sealain meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satu upaya untuk dapat menurunkan kemiskinan ialah dengan adanya Perlindungan Sosial berupa adanya Dana Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dari kerentanan kondisi yang terjadi (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Bantuan Sosial ini tidak selalu diberikan secara berkelanjutan, melainkan pemerintah harus melihat indikator-indikator seseorang atau kelompok yang berhak mendapatkan Bantuan Sosial tersebut. Besaran dari Dana Bantuan Sosial ini juga tidak memiliki ketetapan, dimana nominalnya ditentukan masing-masing oleh setiap Kepala Daerah dan DPRD sesuai dengan kemampuan saat merumuskan APBD tahun berikutnya. Dana Bantuan Sosial ini adalah salah satu

bentuk tindakan pemerintah secara langsung untuk menekan angka kemiskinan di daerahnya masing-masing dalam jangka pendek.

Kota Tegal adalah salah satu kota yang terletak di provinsi Jawa Tengah yang berada di ujung barat dan terletak di pantai utara pulau Jawa. Secara astronomis wilayah Kota Tegal terletak pada $109^{\circ} 08'$ sampai $109^{\circ} 10'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}50'$ sampai $6^{\circ}53'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Tegal adalah 39.68 KM^2 , atau sekitar 0,11% dari luas Jawa Tengah. Wilayah Kota Tegal berbatasan langsung dengan tiga kabupaten, yaitu sebelah timur Kabupaten Pemalang, sebelah barat Kabupaten Brebes, sebelah selatan Kabupaten Tegal, dan disebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Secara administrasi Kota Tegal terbagi atas 4 kecamatan yang terdiri 27 kelurahan. Saat ini total populasi penduduk Kota Tegal 247.217 jiwa. Sektor utama perekonomian Kota Tegal adalah sektor perdagangan dan jasa. Usaha kecil dan menengah yang cukup pesat kemajuannya adalah industri logam rumahan di JL. Cempaka dan kerajinan batik Tegalan di Kelurahan Kalinyamat. Kota Tegal terkenal akan warung makannya yang diberi nama Warung Tegal (WARTEG).

Seperti di daerah lainya permasalahan kemiskinan juga terjadi di Kota Tegal. Berdasarkan data dari BPS sejak tahun 2010 peresentase penduduk miskin di Kota Tegal memiliki kecenderungan menurun berturut-turut, namun pada tahun 2020 kembali naik karena pandemi covid, dengan demikian masih terus dibutuhkan komitmen antara pemerintah dan masyarakat untuk menekan angka ini sehingga kesejahteraan benar-benar bisa dinikmati secara menyeluruh oleh penduduk Kota Tegal. Salah satu cara mengurangi kemiskinan yaitu dengan

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Siregar (2008)^[3] Pertumbuhan ekonomi adalah syarat keharusan untuk mengurangi kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS laju pertumbuhan ekonomi Kota Tegal dari tahun 2010 sampai 2017 mengalami naik turun fluktuatif namun dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami penurunan. Dalam hal ini pemerintah terus melakukan upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan adanya penyaluran dana bantuan sosial melalui APBN dan APBD. Oleh karena itu peneliti akan meneliti pengaruh antara bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Tegal, adapun untuk judul pada penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kota Tegal Tahun 2010-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah :

1. Bagaimana pengaruh Dana Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan di Kota Tegal.
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kota Tegal.
3. Bagaimana pengaruh Dana Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kota Tegal.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh Dana Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan di Kota Tegal.
2. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kota Tegal .
3. Mengetahui pengaruh Dana Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kota Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian sebagai berikut :

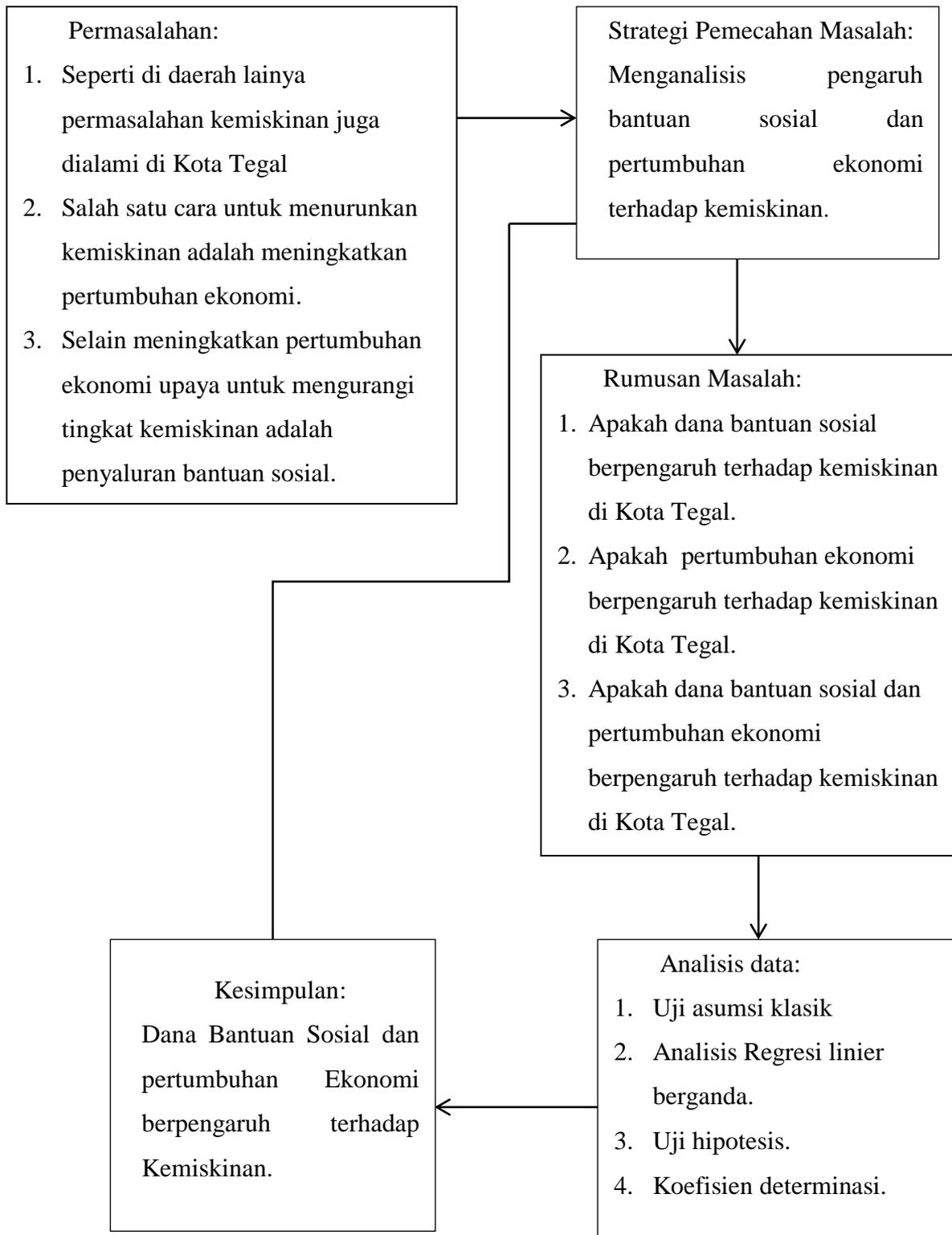
- a) Mendapatkan informasi tentang Pengaruh Bantuan Sosial dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kota Tegal.
- b) Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan kemiskinan di Kota Tegal
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah.
- d) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi pembaca yang sedang melakukan penelitian.

1.5 Batasan masalah

Penelitian ini hanya membahas Dana Bantuan Sosial yang diberikan oleh pemerintah yang berasal dari data APBD Kota Tegal. Pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini menggunakan Presentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tegal. Kemiskinan pada penelitian ini menggunakan presentase penduduk miskin Kota Tegal. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk). Penelitian ini hanya menggunakan data dari tahun 2010-2019 dan dilakukan di Kota Tegal tidak memasukan kota lain yang ada di Indonesia.

1.6 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang akan mempengaruhi satu variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan. Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas alur pemikiran dalam penelitian maka perlu dibuat kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1. Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas proposal ini. Sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1) Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pengesahan, halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar table, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2) Bagian isi terdiri dari 3 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berfikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi landasan teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dipilih yang akan dijadikan landasan dalam penulisan Tugas Akhir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, definisi operasional variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskriptif variabel, Analisis statistik, Pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dengan teori-teori yang ada.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang akhir dari penulisan yang membahas tentang kesimpulan pembahasan disertai dengan saran dari peneliti terkait dengan kesimpulan.

3) Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku dan literatur yang berkaitan dengan peneliti. Lampiran berisi tentang perlengkapan dalam mendukung penelitian tugas akhir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Definisi Kemiskinan

Menurut Kuncoro (2003)^[4] Kemiskinan didefinisikan sebagai “ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum”. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

World Bank (2010)^[5] mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Hal ini termasuk penghasilan rendah dan ketidakmampuannya untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya suara dan kapasitas yang memadai, serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik.

Berdasarkan teori di atas maka secara umum kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik sandang, papan, maupun pangan.

Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian suatu negara, terutama pada negara-negara yang masih berkembang atau negara ketiga, dimana masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional. Kemiskinan bersifat kompleks artinya kemiskinan tidak muncul secara mendadak, namun memiliki latar belakang yang cukup panjang dan rumit sehingga sangat sulit untuk mengetahui akar dari masalah kemiskinan itu sendiri, sedangkan kemiskinan bersifat multidimensional artinya melihat dari banyaknya kebutuhan manusia yang bermacam-macam, maka kemiskinan juga memiliki aspek primer seperti kemiskinan akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan, serta aset sekunder seperti kemiskinan akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Sebagai dampak dari sifat kemiskinan tersebut tergambar dalam bentuk kekurangan gizi, air, dan perumahan yang tidak sesuai, pelayanan kesehatan yang kurang baik, serta rendahnya tingkat pendidikan sehingga dapat memicu ketimpangan.

2.1.2 Penyebab Kemiskinan

Menurut Sharp dalam Kuncoro (2006)^[4] terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan

sumber daya yang membuat distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang berakibat pada pendapatan yang rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya masalah dari keturunan. Ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Menurut Todaro (2003)^[6] kemiskinan yang terjadi di negara–negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut :

- 1) Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
- 2) Pendapatan perkapita negara-negara Dunia Ketiga juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami kemacetan.
- 3) Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata.
- 4) Mayoritas penduduk di negara-negara berkembang harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
- 5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat

kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara maju.

- 6) Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

Adapun menurut Bappenas menguraikan indikator-indikator penyebab kemiskinan seperti:

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, kurangnya layanan kesehatan reproduksi, jarak fasilitas kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal.
3. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung.
4. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan

kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga.

5. Terbatasnya akses layanan kesehatan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak.
6. Terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air.
7. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur, penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian.
8. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam.
9. Lemahnya jaminan rasa aman, hal ini terkait dengan permasalahan yang terjadi di daerah konflik.
10. Lemahnya partisipasi. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang melibatkan mereka.
11. Besarnya beban kependudukan yang dipicu oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi.

2.1.3 Ukuran kemiskinan

Badan Pusat Statistik dalam mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Berdasarkan pendekatan tersebut, indikator yang sering digunakan adalah *Head Count Index* (HCI) yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*). Selain *Head Count Index* (P_0) terdapat juga indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan, yaitu indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke. Rumus yang digunakan adalah Dimana:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^{\alpha}$$

Z = garis kemiskinan

I = rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

Q = banyak penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

N = jumlah penduduk

α = 0,1,2

$\alpha = 0$ = *Head Count Index* (p_0)

$\alpha = 1$ = *Poverty Gap Index* (P_1)

$\alpha = 2$ = *poverty severity Index* (P_2)

Head Count Index (P_0) merupakan jumlah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan semakin berkurangnya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Demikian juga sebaliknya, bila angka P_0 besar maka menunjukkan tingginya jumlah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. *Poverty Gap Index* (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Angka ini memperlihatkan jurang (gap) antara pendapatan rata-rata yang diterima penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan secara rata-rata pendapatan penduduk miskin sudah semakin mendekati garis kemiskinan. Semakin tinggi angka ini maka semakin besar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk *Poverty Severity Index* (P_2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Angka ini memperlihatkan distribusi pendapatan antar kelompok miskin. Semakin kecil angka ini menunjukkan distribusi pendapatan diantara penduduk miskin semakin merata. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat konsumsi seseorang dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi orang perbulan. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Untuk mengidentifikasi kemiskinan

sering digunakan adalah garis kemiskinan (*poverty line*). Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Garis kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Arsyad (2016)^[7] pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Menurut Kuznets dalam Todaro (2003)^[6] Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Menurut Todaro dalam Arsyad (2016)^[7] ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Akumulasi modal

Akumulasi modal mencakup semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik (mesin-mesin), dan sumber daya manusia (*human resources*). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang di tabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa depan. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap angka produksi.

2. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*), dan telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada tiga klasifikasi kemajuan teknologi, yakni:

- a) Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.
- b) Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (*labor saving*) atau hemat modal (*capital saving*), yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama.
- c) Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.

2.2.2 Ukuran Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah yaitu dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat

bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Menurut BPS, cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan, yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen, dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya.
- 2) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku yaitu jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diketahui melalui perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah yang dinilai atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu (PDRB_t) dengan PDRB tahun sebelumnya (PDRB_{t-1}). Rumus yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi yaitu :

$$G_t = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_t} \times 100\%$$

Keterangan :

G_t = Pertumbuhan Ekonomi periode t

PDB_t = Produk domestik Bruto periode t (atas harga konstan)

PDB_{t-1} = Produk Domestik Bruto periode sebelumnya

2.2.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan yang kontroversional. Menurut Kuznet dalam Tambunan (2014)^[8] memiliki korelasi yang kuat terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi pada tahap awal menyebabkan tingkat kemiskinan cenderung meningkat namun pada saat mendekati tahap akhir terjadi pengurangan tingkat kemiskinan secara berkesinambungan. Dengan demikian, dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Selanjutnya didukung oleh penelitian Susanto, R dan Pangesti, I. (2020)^[9] menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Menurut Siregar (2008)^[3] menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) adalah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi

kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja. Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan peran pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur. Dari hasil penelitian berarti pertumbuhan ekonomi telah menyebar di setiap golongan masyarakat miskin sehingga efektif menurunkan tingkat kemiskinan.

2.2 Bantuan Sosial

2.3.1 Perlindungan Sosial (*Social Security*)

Menurut Barrientos dan Shepherd (2003) dalam (Supriyanto, Ramdhani, & Rahmadan, 2014)^[10] perlindungan sosial secara umum dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, asuransi sosial, dan jaringan pengaman sosial. Menurut Supriyanto et al., (2014)^[10] Perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai kumpulan upaya publik yang dilakukan dalam menghadapi dan menanggulangi kerentanan, risiko, dan kemiskinan yang sudah melebihi batas. Perlindungan sosial ini pada dasarnya difokuskan dalam prinsip keadilan sosial, serta hak-hak spesifik dimana setiap orang harus mendapatkan jaminan sosial dan standar kehidupan yang memadai agar dapat memperoleh layanan kesehatan serta kesejahteraan bagi mereka maupun keluarga mereka untuk memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidaksetaraan..

Saat ini, beberapa negara sudah memasukkan elemen-elemen utama tersebut ke dalam sistem perlindungan sosial yang mereka miliki. Pada negara-negara dengan penghasilan menengah ke bawah, akses pada program perlindungan sosial sejalan dengan upaya mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan masalah sosial lainnya. Menurut World Bank (2015)^[5] mendefinisikan perlindungan sosial sebagai seperangkat tindakan publik yang dilakukan untuk melindungi warganya dari tekanan ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan, sebagai akibat dari berbagai kemungkinan (sakit, persalinan, kecelakaan kerja, pengangguran, usia lanjut, dan kematian pencari nafkah); penyediaan layanan kesehatan; dan pemberian tunjangan bagi keluarga yang memiliki anak. Secara umum, perlindungan sosial adalah tentang bagaimana cara untuk menjaga diri kita dan satu sama lain untuk mengelola risiko.

Menurut Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai intervensi publik yang berorientasi pada modal manusia untuk membantu individu, rumah tangga, dan masyarakat untuk mampu mengelola risiko, dan memberikan dukungan kepada orang miskin yang tidak mampu. Konsep perlindungan sosial yang luas diantaranya dipicu oleh kekhawatiran dunia akan risiko guncangan sosial ekonomi serta ancaman terhadap penghidupan yang semakin besar. Perluasan kosep perlindungan juga salah satunya dibahas dalam Pertemuan Puncak Pembangunan Milenium tahun 2010 oleh ILO (*International Labor*

Oganization) bersama para kepala Negara dan pemerintahan dunia. Perlindungan sosial menjadi sebuah bagian terpadu dari kebijakan sosial yang dirancang untuk menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses dalam layanan sosial untuk semua penduduk. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tergolong rentan, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam seluruh siklus kehidupan (Supriyanto et al., 2014)^[10]. Secara umum, perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Tujuan utama yang diharapkan dengan terlaksananya perlindungan sosial adalah mencegah risiko yang dialami penduduk sehingga terhindar dari kesengsaraan yang berkepanjangan, meningkatkan kemampuan kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi; serta, memungkinkan kelompok miskin dan rentan untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Pada era sebelum krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997 – 1998, Indonesia belum memiliki sebuah sistem perlindungan sosial yang terstruktur dan terpadu. Pada era tersebut perlindungan sosial dilaksanakan dalam konteks penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian layanan publik. Pada era pasca-reformasi, dimana akibat

dari krisis tersebut ialah penurunan pendapatan riil, kelaparan yang merajalela, pengangguran, putus sekolah, serta dampak lainnya menjadi ancaman yang dapat meluas ke penjuru Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia ialah melakukan kebijakan intervensi dengan sebutan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat miskin serta masyarakat yang jatuh miskin karena krisis melalui intervensi pada beberapa bidang, yakni pangan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Lalu pada era pasca-krisis dan reformasi, lahirlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mendefinisikan kembali sistem jaminan sosial di Indonesia untuk masa mendatang. Pada awal tahun 2000-an muncul berbagai program untuk berbagai bidang seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk bantuan operasional kepada sekolah-sekolah di Indonesia, Asuransi Kesehatan Untuk Rakyat Miskin (Askeskin) yang kini menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk bidang kesehatan, Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin) dalam bidang pangan yang merupakan transformasi dari program Operasi Pasar Khusus (OPK), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan berubah menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) saat kenaikan harga BBM, Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) bagi masyarakat lanjut usia, serta program Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB) bagi masyarakat penyandang disabilitas (Supriyanto et al., 2014)^[10].

Masalah yang kini dihadapi Indonesia dalam hal perlindungan sosial ialah ketidak tepatan sasaran dalam penentuan penerima program, mekanisme pendampingan program belum optimal, koordinasi dan pelaksanaan program belum terintegrasi, dan prioritas pendanaan untuk Program Perlindungan Sosial masih terbatas. Menurut Scott (2012) dalam Supriyanto, Ramdhani, et al (2014)^[10] menyatakan bahwa tipe program perlindungan sosial yang paling umum mencakup bantuan sosial, jaminan sosial, intervensi pasar tenaga kerja, dan program berbasis komunitas/informal..

2.3.2 Bantuan Sosial

Menurut Permendagri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pendoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah pemberian uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan Sosial terdiri dari dua jenis; (1) Bantuan Sosial yang direncanakan, dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD dan (2) Bantuan Sosial yang tidak direncanakan, adalah Bantuan Sosial yang dialokasikan akibat resiko sosial yang tidak direncanakan saat penyusunan APBD dan jika menyalurannya ditunda maka akan

menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Permendagri Nomor 32 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai upaya untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial (termasuk kondisi psikososial, dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Program Bantuan Sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengurangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam program Bantuan Sosial tidak bergantung kepada kontribusi dari penerima manfaatnya. Bantuan Sosial dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang (*in-cash transfers*), juga dalam bentuk barang dan pelayanan (*in-kind transfers*) (Supriyanto et al., 2014)^[10]. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu mengalokasikan Dana Bantuan Sosial baik di APBN maupun APBD setiap tahunnya.. Setiap provinsi dan kab/kota diberikan kebebasan dalam menentukan Dana Bantuan Sosial mereka sesuai dengan kemampuan finansial daerah tersebut. Tujuan dari adanya Dana Bantuan Sosial adalah menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan miskin. Indikator penerima Dana Bantuan Sosial ialah (1) selektif, dimana pihak yang menerima dana Bantuan Sosial adalah mereka yang ditunjuk untuk dilindungi dari kemungkinan resiko sosial; (2) memenuhi

persyaratan penerima bantuan, yaitu pihak yang memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam bantaran; (3) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan (4) sesuai dengan tujuan penggunaan seperti untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana. Maka dari itu Pemerintah Pusat melaksanakan berbagai program guna menekan jumlah kemiskinan yang angkanya melonjak naik sejak krisis moneter 1998 berupa Jaminan Pengaman Sosial (JPS), Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM, bantuan tidak langsung berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sejak tahun 2010 pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia. TNP2K memiliki tujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Saat ini Pemerintah Pusat memiliki berbagai program antara lainnya (Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K):

- 1) Program di Bidang Pangan berupa Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- 2) Program di Bidang Pendidikan berupa Program Indonesia Pintar (PIP), Program Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat Miskin (Bidikmisi), dan Program Keterampilan Hidup.

- 3) Program di Bidang Kesehatan berupa Program Indonesia Sehat.
- 4) Program di Bidang Energi berupa Program Subsidi Listrik, Program Subsidi ELPIJI 3kg, dan Program Bantuan Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).
- 5) Program di Bidang Ekonomi dan Sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Program Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK), Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), dan Program Asistensi Sosial Penduduk Lanjut Usia Terantar (ASLUT).
- 6) Program di Bidang Perumahan berupa Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH dan Sarling), Program Bantuan Pembiayaan Perumahan, dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- 7) Program di Bidang Pertanian berupa Subsidi Pupuk, Program Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (BP-AUTP), dan Program Bantuan Premi Asuransi Ternak Sapi (BP-AUTS).
- 8) Program di Bidang Kelautan/Perikanan berupa Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dan Program Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (BP-AIK).

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis Penelitian adalah dugaan atau jawaban sementara pada suatu permasalahan yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui penelitian. Adapun perumusan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan

Salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah adanya penyaluran bantuan Sosial yang dianggarkan pada APBN dan APBD. Adapun Tujuan Utama penyaluran Dana Bantuan Sosial adalah untuk menurunkan kemiskinan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Nuraniah (2019)^[11] dengan judul “Analisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Belanja Bantuan Sosial dan pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan” menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Bantuan Sosial berpengaruh secara parsial terhadap Kemiskinan.

b. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan yang kontroversional. . Menurut Kuznet dalam Tambunan (2014)^[7] memiliki korelasi yang kuat terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi pada tahap awal menyebabkan tingkat kemiskinan cenderung meningkat namun pada saat mendekati tahap akhir terjadi pengurangan tingkat kemiskinan secara

berkesinambungan. Dengan demikian, dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Selanjutnya didukung oleh penelitian Susanto, R dan Pangesti, I. (2020)^[9] menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap Kemiskinan

c. Pengaruh Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks, Oleh karena itu, upaya dalam pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara efektif, mencakup segala aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi upaya untuk mengentaskan kemiskinan yaitu dengan adanya Bantuan sosial yang di anggarkan pada APBN dan APBD. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan bantuan Sosial memiliki korelasi dan berpengaruh terhadap kemiskinan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemiskinan

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini yang menjadi rujukan dan ahan acuan penelitian ini:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1.	Faros Syahiroh (2021). “Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Penduduk Miskin Di Kta-Kota Sumatera Selatan”.	Dana Alokasi Khusus (X ₁) Belanja Modal (X ₂) Belanja Bantuan Sosial (X ₃) Penduduk Miskin (Y)	- Analisis regresi Data Panel dengan model <i>Fixed Effect Methode</i> (FE M)	Hasil penelitian bahwa Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan sosial secara bersama-sama berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Secara individu Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan Belanja Bantuan Sosial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

2.	Handaruhing Kudus Priyo Riksananta (2017). “Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dana Bantuan sosial, dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan di provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2010-2014”	PDRB (X_1) Tingkat Pengangguran (X_2) Tingkat Pendidikan (X_3) Dana bantuan sosial (X_4) Belanja modal (X_5) Tingkat Kemiskinan (Y)	- Analisis regresi Data Panel - Model <i>Pool effect Cross-section Weight</i>	Hasil penelitian adalah Hubungan PDRB terhadap kemiskinan negatif tetapi tidak signifikan. Hubungan Tingkat pengangguran terhadap Kemiskinan positif dan Signifikan. Hubungan Pendidikan terhadap kemiskinan adalah negatif tetapi signifikan. Sedangkan hubungan dana Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan adalah positif dan signifikan. Hubungan Belanja Modal terhadap Kemiskinan negatif signifikan.
3.	Kurniasih Anderesta (2019) “Pengaruh Bantuan Sosisal Dan Tingkat Inflasi Terhadap Kemiskinan Seluruh Provinsi Di Indonesia”	Dana Bantuan Sosial (X_1). Tingkat Inflasi (X_2). Presentase Kemiskinan (Y).	- Anlisis regresi Data Panel dengan pendekatan REM (<i>Random Effect Method</i>) dan FEM (<i>Fixed Effect Method</i>)	Hasilnya menunjukkan bahwa variabel Bantuan Sosial hanya memiliki pengaruh yang signifikan pada kelompok Provinsi Bali, Nusa Tenggara Maluku dan Paua. Pada Kelompok Provinsi Kalimantan dan Sulawesi, variabel Bantuan Sosial memiliki nilai koefisien positif terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel inflasi memiliki koefisien positif pada

				keempat kelompok regresi dan signifikan mempengaruhi kemiskinan.
4.	Nuraniah, (2017) “Analisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Belanja Bantuan Sosial, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Selatan”	Kesempatan Kerja (X_1). Belanja Bantuan Sosial (X_2). Pertumbuhan Ekonomi (X_3). Tingkat kemiskinan (Y)	- Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian yaitu secara simultan variabel kesempatan kerja, Belanja bantuan Sosial, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan, sedangkan secara parsial variabel kesempatan kerja tidak mempengaruhi Kemiskinan tetapi variabel belanja bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kota Tegal yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan yaitu dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2021.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Suliyanto (2005:135)^[12] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Dalam penelitian ini data kuantitatif yang diperoleh realisasi anggaran belanja bantuan sosial laju persentase laju pertumbuhan PDRB, dan Persentase penduduk miskin.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, menurut Suliyanto (2005:132)^[12] adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari Buku, Jurnal Penelitian, dan dari beberapa publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tegal khususnya data tahun 2010 sampai dengan 2019. Data yang diteliti meliputi dana bantuan sosial, pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Menurut Sugiyono (2015:329)^[13] metode dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi berbentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian. Metode ini dilakukan untuk mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti realisasi anggaran belanja bantuan sosial, laju pertumbuhan Ekonomi, dan Persentase penduduk miskin.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2012:59)^[13] variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya

Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu:

a. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2005:3)^[13] variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah:

- Bantuan Sosial = (X₁)
- Pertumbuhan Ekonomi = (X₂)

b. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2005:3)^[13] variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah persentase Kemiskinan yang diberi simbol Y.

3.7 Analisis data

Metode Analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis data menggunakan program Eviews 9. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab penelitian yang menganalisis pengaruh antar variabel. Penggunaan analisis deskriptif ditujukan untuk mengetahui gambaran pengaruh Bantuan Sosial, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

Agar pengujian hipotesis berdasarkan model analisis tidak bisa atau bahkan menyesatkan, maka perlu digunakan uji asumsi klasik :

1) Uji Normalitas

Menurut Priyatno (2014:69)^[14] uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak normalitas data merupakan hal yang penting karena dengan data yang terdistribusi normal, maka data tersebut dapat mewakili populasi.

Salah satu cara untuk Uji normalitas yaitu dengan uji Jarque-Bera. Uji Jarque Bera adalah salah satu uji normalitas jenis *goodnes of fit test* yang mengukur apakah skewnes dan kurtosis sampel dengan distribusi normal. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan uji Jarque-Bera dengan ketentuan melihat nilai Prob. Jarque Bera. jika nilai Probabilitas JB melebihi nilai α ($> 0,05$), maka dapat dikatakan data berdistribusi normal, dan sebaliknya jika nilai prob. JB kurang dari α ($< 0,05$) maka dapat dikatakan data tidak berdistribusi normal (Bawono, 2018)^[15].

2) Uji Multikolinearitas

Menurut Priyatno (2014:99)^[14] uji multikolinearitas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF), dengan ketentuan Jika nilai $VIF > 10$ maka terjadi multikolinearitas, dan jika nilai $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas (Bawono, 2018)^[15].

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data *time series* (runtut waktu). Pada penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan uji *Langrange Multiplier* (LM) uji ini lebih tepat

digunakan untuk sampel yang relatif besar. Uji LM akan menghasilkan statistik Breusch-Godfrey sehingga uji LM juga disebut Uji Breusch-Godfrey (BG). Uji LM pada penelitian ini menggunakan perangkat *eviews* dengan ketentuan jika nilai Prob. Chi-Square(2) lebih dari ($> 0,05$) maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi, dan sebaliknya jika nilai Prob. Chi-Square(2) kurang dari ($< 0,05$) maka dapat disimpulkan terjadi masalah autokorelasi (Bawono, 2018)^[15].

4) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Priyatno (2014:108)^[14] uji heteroskedastisitas adalah variabel residual yang tidak sama pada semua pengamatan didalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka di sebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji test Breusch Pagan Godfrey (BPG). Uji heteroskedastisitas tes BPG adalah uji dilakukan untuk membuktikan apakah varian kesalahan dari regresi tergantung pada nilai variabel independen. Uji Heteroskedastisitas dengan test BPG akan menghasilkan nilai probabilitas $Obs \cdot R\text{-Square}$ yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai α (0,05) dengan ketentuan jika nilai probabilitas lebih

dari α ($> 0,05$) maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedasitas dan sebaliknya jika nilai probabilitas kurang dari nilai α ($< 0,05$) maka dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedasitas (Bawono, 2018)^[15].

3.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Dengan menganalisis data yang diperoleh untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan model ekonometrika dengan meregresikan variabel-variabel yang ada dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Data-data yang digunakan, dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik yaitu persamaan regresi linear berganda. Variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y = Tingkat Kemiskinan.

A = Bilangan konstanta

b_1 - b_2 = Koefisien regresi berganda

X_1 = Dana bantuan Sosial

X_2 = Laju pertumbuhan PDRB

3.7.3 Uji Hipotesis

1) Uji F Simultan

Uji F digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Pengambilan kesimpulanya adalah dengan membandingkan nilai Probabilitas atau *p-value* dengan nilai α (0,05) dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika nilai Probabilitas $< \alpha$ maka Hipotesis diterima

Jika nilai Probabilitas $> \alpha$ maka Hipotesis ditolak

2) Uji t Parsial

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui besarnya signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual (parsial), dengan menganggap variabel lain bersifat konstanta. Pengambilan keputusannya dengan melihat nilai Probabilitas (*F-Statistic*) atau *p-value* yang dibandingkan dengan nilai α (0,05) dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika nilai Probabilitas $< \alpha$ maka Hipotesis diterima

Jika nilai Probabilitas $> \alpha$ maka Hipotesis ditolak

3.7.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien determinasi (*goodness of fit*), yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam dalam regresi. Determinan (R^2) mencerminkan kemampuan variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar pengaruh proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel dependen.

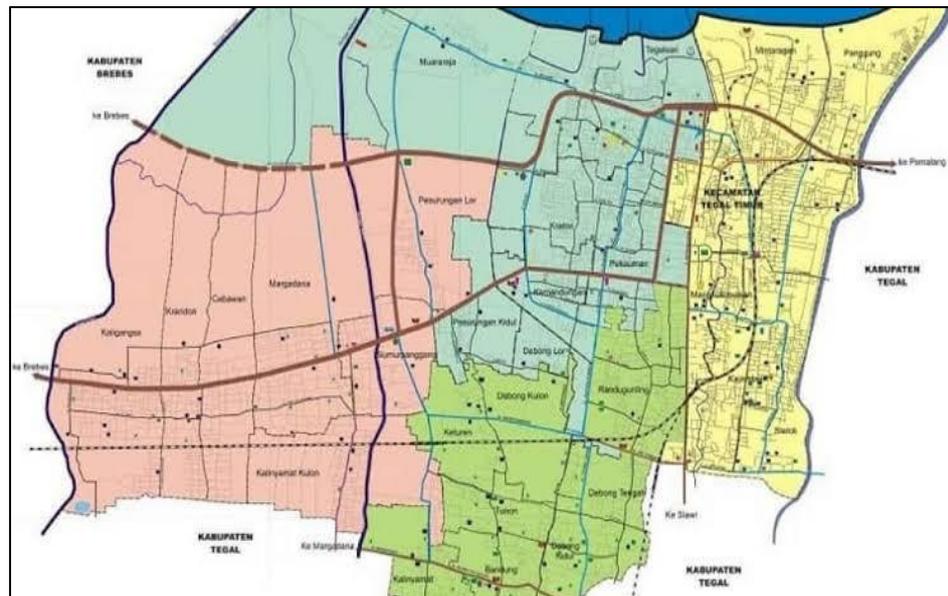
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Tegal

Kota Tegal adalah salah satu kota yang terletak di pulau Jawa tepatnya provinsi Jawa Tengah yang berada di ujung barat dan terletak di pantai utara pulau jawa. Dasar Hukum terbentuknya Kota Tegal adalah UU No. 13 Tahun 1950, adapun hari jadi Kota Tegal adalah 12 April 1580. Secara astronomis wilayah Kota Tegal terletak pada $109^{\circ} 08'$ sampai $109^{\circ} 10'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}50'$ sampai $6^{\circ} 53'$ Lintang Selatan. Pada tahun 1987, Kota tegal mengalami pemekaran wilayah yang berasal dari kabupaten Tegal, ditambah dengan wilayah Kabupaten Brebes yang dikenal dengan sebutan “BOKONG SEMAR” Luas wilayah Kota Tegal saat ini adalah 39.68 KM^2 , atau sekitar 0,11% dari luas Jawa Tengah. Secara geografis Kota Tegal terletak pada pertigaan jalur Purwokerto-Jakarta dan Semarang-Jakarta. Wilayah Kota Tegal berbatasan langsung dengan tiga kabupaten, yaitu sebelah timur Kabupaten Pemalang, sebelah barat Kabupaten Brebes, sebelah selatan Kabupaten Tegal , dan disebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Batas wilayah Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.1 Peta Kota Tegal

Wilayah administratif Kota Tegal terbagi menjadi 4 kecamatan yang terdiri 27 Kelurahan. Kecamatan Tegal Selatan terdiri dari delapan kelurahan yaitu Kalinyamat Wetan, Bandung, Randugunting, Debong Kidul, Debong Kulon, Debong Tengah, Keturen, dan Tunon. Kecamatan Tegal Timur terdiri dari lima kelurahan yaitu Kejambon, Slerok, Panggung, Mangkukusuman, dan Mintaragen. Tegal Barat terdiri dari tujuh kelurahan yaitu Pesurungan Kidul, Debong Lor, Kemandungan, Pekauman, Kraton, Tegal Sari, dan Muarareja. Selanjutnya kecamatan Margadana yang terdiri dari tujuh kelurahan yaitu Kaligangsa, Krandon, Cabawan, Margadana, Kalinyamat Kulon Pesurungan Lor, dan Sumur Panggang. Untuk mempermudah dalam tata kelola pelayanan kepada masyarakat wilayah-wilayah tersebut terbagi lagi kedalam 163 Rukun

Warga (RW) dan 1.104 Rukun Tetangga (RT). Wilayah administratif secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut

Tabel 4.1 wilayah administratif Kota Tegal

Kecamatan dan kelurahan	Luas	Jumlah RW	luas
Kecamatan Tegal Selatan:	6,43	Kecamatan Timur	6,36
1. Kel. Kalinyamat Wetan	0,89	1. Kel. Kejambon	0,86
2. Kel. Bandung	0,59	2. Kel. Slerok	1,39
3. Kel. Debong Kidul	0,35	3. Kel. Mangkukusuman	0,47
4. Kel. Tunon	0,75	4. Kel. Panggung	2,23
5. Kel. Katuren	0,62	5. Kel. Mintaragen	1,41
6. Kel. Debong Kulon	0,74		
7. Kel. Debong Tengah	1,11		
8. Kel. Randugunting	1,38		
Kecamatan Tegal Barat	15,13	Kecamatan Margadana	11,76
1. Kel. Pesurungan Kidul	0,72	1. Kel. Kaligangsa	2,53
2. Kel. Debong Lor	0,56	2. Kel. Krandon	1,20
3. Kel. Kemandungan	0,56	3. Kel. Cabawan	1,28
4. Kel. Pekauman	0,96	4. Kel. Margadana	2,41
5. Kel. Kraton	1,23	5. Kel. Kalinyamat Kulon	1,52
6. Kel. Tegal Sari	2,19	6. Kel. Sumurpanggung	1,00
7. Kel. Muarareja	8,91	7. Kel. Pesurungan Lor	1,82

Sumber : Badan Pusat Statistik

4.1.2 Kemiskinan di Kota Tegal

Kemiskinan merupakan suatu situasi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya dalam sehari-hari. Kemiskinan sangat sulit dihindari terlebih pada negara berkembang. kemiskinan bukan saja sebatas kekurangan ekonomi akan tetapi mengalami perlakuan yang

tidak baik dari lingkungan masyarakat yang memiliki tingkat penghasilan yang lebih tinggi, hal ini menjadikan adanya kesenjangan pada si kaya dan si miskin dikarenakan status sosial yang berbeda. Keadaan tersebut sangat memprihatinkan sehinggalah menghimbau pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Namun Pemerintah yang telah memberikan kebijakan-kebijakan guna menurunkan tingkat kemiskinan di disuatu daerah sangat sulit dalam menuntaskan kemiskinan. Seperti di daerah lainya kemiskinan juga terjadi di Kota Tegal. Dibawah ini disajikan data Kemiskinan di Kota Tegal Tahun 2010-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Persentase Kemiskinan di Kota Tegal 2010-2019

Tahun	Persentase kemiskinan
2010	10,62
2011	10,81
2012	10,04
2013	8,84
2014	8,54
2015	8,26
2016	8,2
2017	8,11
2018	7,81
2019	7,47

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kemiskinan yang ada di Kota Tegal mengalami penurunan di setiap tahun. Seperti terlihat di tabel yang mana pada tahun 2010 kemiskinan sebesar (10,62%) dan semakin turun pada tahun 2019 menjadi (7,47%). Namun demikian masih terus dibutuhkan komitmen antara pemerintah dan masyarakat untuk menekan angka ini sehingga

kesejahteraan benar-benar bisa dinikmati secara menyeluruh oleh penduduk Kota Tegal. Selain harus mengurangi jumlah, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tegal

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang penting dalam mengurangi kemiskinan, Menurut Siregar (2008)^[3] Pertumbuhan ekonomi adalah syarat keharusan untuk mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam skala regional, pertumbuhan ekonomi dihitung dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode pembangunan tertentu, baik secara riil maupun secara nominal. Berikut ini disajikan tabel pertumbuhan ekonomi di Kota Tegal dari tahun 2010-2019.

Tabel 4.3 Persentase Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tegal
Tahun 2010-2019

Tahun	Persentase Pertumbuhan Ekonomi
2010	5,36
2011	6,47
2012	4,21
2013	5,67
2014	5,04
2015	5,45
2016	5,49
2017	5,95
2018	5,87
2019	5,77

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Tegal tidak stabil. Hal ini di karenakan tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Tegal mengalami naik turun fluktuatif. Pada tahun 2010, yaitu sebesar (5,36%) naik di tahun 2011 sebesar (6,47%) kemudian mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar (4,21%) dan kembali naik pada tahun 2013 sebesar (5,67%).pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi kembali turun menjadi 5,04%), kemudian kembali naik pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2018 dan 2019 laju pertumbuhan ekonomi kembali turun (5,87%) dan (5,77%). Sektor utama perekonomian Kota Tegal adalah sektor perdagangan dan jasa. Usaha kecil dan menengah yang cukup pesat kemajuanya adalah industri logam rumahan di JL. Cempaka dan kerajinan batik Tegal di Kelurahan Kalinyamat.

4.1.4 Realisasi Belanja Bantuan sosial di Kota Tegal

Salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah Bantuan Sosial. Program Bantuan Sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengurangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam program Bantuan Sosial tidak bergantung kepada kontribusi dari penerima manfaatnya. Bantuan Sosial dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang (*in-cash transfers*), juga dalam bentuk barang dan pelayanan (*in-kind transfers*) (Supriyanto et al., 2014)^[10]. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu menganggarkan Dana Bantuan Sosial baik di APBN maupun APBD setiap tahunnya. Berikut ini adalah realisasi anggaran belanja Bantuan Sosial pada realisasi APBD Kota Tegal dari tahun 2010-2019 :

Tabel 4.4 Belanja Bantuan Sosial Pada realisasi APBD Kota Tegal

Tahun	Dana Bantuan Sosial (milyar)
2010	24,88
2011	27,79
2012	14,07
2013	17,95
2014	14,28
2015	0,69
2016	0,21
2017	0,17
2018	0,22
2019	3,58

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan

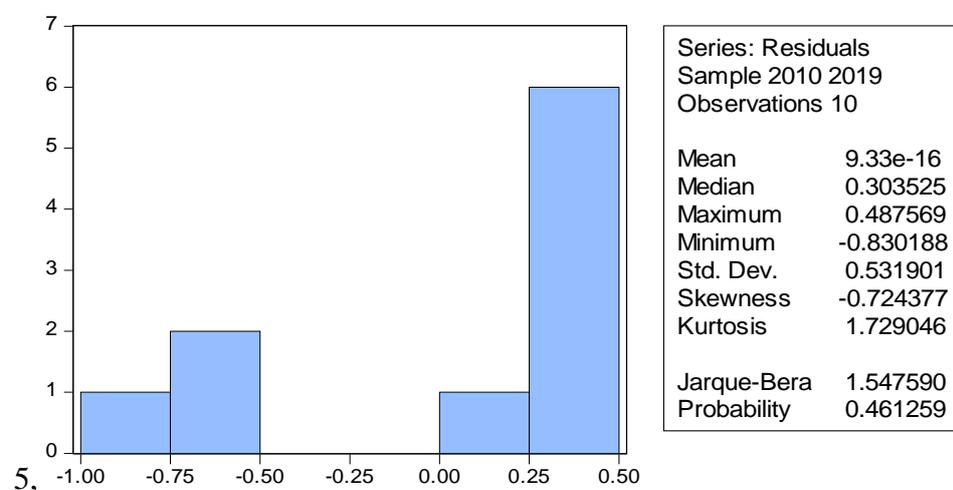
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap tahun pemerintah Kota Tegal selalu merealisasikan anggaran dana Bantuan Sosial. Walaupun nominal realisasi anggaran Bantuan Sosial selalu berubah-ubah, namun demikian pemerintah masih berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan melalui anggaran belanja bantuan sosial.

4.1.5 Hasil Analisis Data

4.1.5.1 Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Salah satu untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji Jarque-Bera yaitu dengan melihat koefisien Jarque-Bera dan probabilitasnya jika nilai probabilitas dari Jarque-Bera dan probabilitasnya jika nilai probabilitas dari Jarque-Bera (JB), jika probabilitas $> 0,05$ maka model dinyatakan normal. Hasil Uji J-B test dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Data diolah tahun 2021

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas pada output eviews diketahui bahwa besaran nilai probabilitas pada JB adalah **0,461259**, lebih besar dibanding nilai ($< 0,05$), dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi normal.

b) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini uji multikolinieritas dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai $VIF > 10$ maka terjadi multikolinieritas, dan jika nilai $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 07/14/21 Time: 00:11
Sample: 2010 2019
Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.470975	95.42139	NA
BS	0.000346	2.026416	1.000000
PE	0.111166	94.39026	1.000000

Sumber: Data diolah tahun 2021

Hasil output eviews 9 diatas tampak bahwa variabel X_1 (Dana Bantuan Sosial) dan X_2 (Pertumbuhan Ekonomi) memiliki nilai *Centered VIF* (< 10) maka dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan linier antara kedua variabel atau tidak terjadi multikolinieritas.

c) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Pada penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan uji serial korelasi dengan serial Breusch-godfrey Serial Corelation LM-test.

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.206530	Prob. F(2,5)	0.2056
Obs*R-squared	4.688231	Prob. Chi-Square(2)	0.0959

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 07/14/21 Time: 00:08

Sample: 2010 2019

Included observations: 10

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.435364	1.629731	0.267139	0.8000
BS	0.007235	0.016773	0.431357	0.6842
PE	-0.088884	0.292298	-0.304087	0.7733
RESID(-1)	0.464427	0.382356	1.214645	0.2787
RESID(-2)	-0.767626	0.391973	-1.958361	0.1075

R-squared	0.468823	Mean dependent var	9.33E-16
Adjusted R-squared	0.043882	S.D. dependent var	0.531901
S.E. of regression	0.520100	Akaike info criterion	1.837260
Sum squared resid	1.352518	Schwarz criterion	1.988552
Log likelihood	-4.186300	Hannan-Quinn criter.	1.671292
F-statistic	1.103265	Durbin-Watson stat	2.265963
Prob(F-statistic)	0.446652		

Sumber: Data diolah tahun 2021

Berdasarkan hasil uji auto korelasi pada output eviews di atas menyatakan bahwa nilai Prob.Chi-Square(2) sebesar **0.0959** lebih dari

(> 0,05) maka mengidentifikasi bahwa data tidak terjadi masalah autokorelasi.

d) Uji Heteroskedasitas

Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, tetapi jika variance dari variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedasitas dan jika berbeda disebut heteroskeditas. Pada penelitian ini uji heteroskedasitas menggunakan uji Breusch-Pagan-Godfrey.

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.465235	Prob. F(2,7)	0.6461
Obs*R-squared	1.173285	Prob. Chi-Square(2)	0.5562
Scaled explained SS	0.209568	Prob. Chi-Square(2)	0.9005

Sumber: Data diolah tahun 2021

Berdasarkan hasil uji heteroskedasitas dengan uji Breusch-Pagan-godfrey pada output eviews di atas menyatakan bahwa nilai probabilitas Obs*R-squared pada Prob. Chi-Square(2) mempunyai nilai 0,5562 lebih besar dari (> 0,05) maka dapat disimpulkan model diatas tidak mengandung heteroskedasitas, dan bersifat homoskedasitas.

4.1.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan model

ekonometrika dengan meregresikan variabel-variabel yang ada dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Data-data yang digunakan, dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistic yaitu persamaan regresi linear berganda. Berikut ini adalah hasil analisis regresi linier berganda dengan evIEWS:

Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: TK
 Method: Least Squares
 Date: 07/14/21 Time: 00:25
 Sample: 2010 2019
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.205156	1.863055	4.940892	0.0017
BS	0.097784	0.018608	5.254928	0.0012
PE	-0.244309	0.333415	-0.732748	0.4875
R-squared	0.800871	Mean dependent var		8.870000
Adjusted R-squared	0.743977	S.D. dependent var		1.191964
S.E. of regression	0.603119	Akaike info criterion		2.069920
Sum squared resid	2.546266	Schwarz criterion		2.160696
Log likelihood	-7.349600	Hannan-Quinn criter.		1.970339
F-statistic	14.07652	Durbin-Watson stat		1.351834
Prob(F-statistic)	0.003523			

Data Diolah tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis regresi linier pada output EvIEWS diatas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 9.205156 + 0,097784 X_1 - 0,244309 X_2 + e$$

Dimana :

$$\begin{aligned} a &= \text{Konstanta} && = 9,205156 \\ \text{BS } (X_1) &= \text{Bantuan Sosial} && b_1 = 0,097784 \\ \text{PE}(X_2) &= \text{Pertumbuhan Ekonomi} && b_2 = -0,244309 \end{aligned}$$

Koefisien- koefisien persamaan regresi linier berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstant sebesar 9,205156 menunjukkan bahwa jika variabel independen lainnya bernilai nol, maka variabel Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 9,205156 %.
- b) Berdasarkan persamaan variabel regresi menunjukkan bahwa variabel X_1 Bantuan Sosial (BS) mempunyai koefisien positif dengan tingkat Kemiskinan $b_1 = 0,097784$ artinya setiap kenaikan pada Bantuan Sosial maka Tingkat Kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 0,097784 %. Hasil penelitian variabel regresi bersifat positif berarti terjadi hubungan positif antara Bantuan Sosial dan Tingkat Kemiskinan. Jika semakin tinggi Bantuan Sosial maka semakin meningkat Tingkat Kemiskinan di Kota Tegal.
- c) Berdasarkan persamaan variabel regresi menunjukkan bahwa variabel X_2 Pertumbuhan Ekonomi (PE) mempunyai koefisien negatif dengan Tingkat Kemiskinan $b_2 = - 0,244309$ bertanda negatif artinya setiap kenaikan pada tingkat pertumbuhan ekonomi maka Tingkat Kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar - 0,244309%. Hasil penelitian variabel regresi bersifat negatif berarti terjadi hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Jika semakin besar pertumbuhan ekonomi di Kota Tegal maka semakin menurun Tingkat Kemiskinan di Kota Tegal dan sebaliknya.

4.1.5.3 Uji Hipotesis

a) Uji F (Simultan)

Uji F adalah uji secara bersama-sama atau simultan antara semua variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berikut ini adalah tabel hasil uji F menggunakan eviews:

Tabel 4.9 Hasil Uji F

R-squared	0.800871	Mean dependent var	8.870000
Adjusted R-squared	0.743977	S.D. dependent var	1.191964
S.E. of regression	0.603119	Akaike info criterion	2.069920
Sum squared resid	2.546266	Schwarz criterion	2.160696
Log likelihood	-7.349600	Hannan-Quinn criter.	1.970339
F-statistic	14.07652	Durbin-Watson stat	1.351834
Prob(F-statistic)	0.003523		

Sumber: Data Diolah tahun 2021

Berdasarkan hasil uji f pada output eviews di atas diperoleh nilai Probabilitas (F-statistic) sebesar **0.003523** lebih kecil dari α ($< 0,05$), maka hipotesis (H_3) diterima artinya secara simultan / bersama-sama variabel Bantuan Sosial (X_1) dan Pertumbuhan Ekonomi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemiskinan (Y). Dalam hal ini berarti Tingkat Kemiskinan di Kota Tegal dipengaruhi oleh dua faktor atau dua variabel yaitu bantuan Sosial dan pertumbuhan ekonomi.

b. Uji t (Parsial)

Uji t adalah uji secara individu dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini Uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas dengan nilai α ($0,05$). Berikut ini adalah tabel hasil uji t menggunakan eviews :

Tabel 4.10 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.205156	1.863055	4.940892	0.0017
BS	0.097784	0.018608	5.254928	0.0012
PE	-0.244309	0.333415	-0.732748	0.4875

Sumber: Data diolah tahun 2021

Berdasarkan hasil Uji t parsial pada output eviews di atas adalah:

- 1) Variabel Bantuan Sosial (X_1) memperoleh nilai koefisien sebesar 0.097784, nilai t-statistic sebesar 5,254928 dan nilai probabilitas sebesar **0.0012** ($< 0,05$) maka hipotesis (H_1) diterima artinya variabel Bantuan Sosial (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan (Y).
- 2) Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_2) memperoleh nilai koefisien sebesar -0,244309, nilai t-statistic sebesar -0.732748 dan nilai probabilitas sebesar **0,4875** ($> 0,05$) maka hipotesis (H_2) ditolak artinya variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_2) negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y).

4.1.5.4 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi yang dinotasikan R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi dari total

variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel dependen.

Berdasarkan hasil penelitian analisis regresi linier berganda pada tabel 4.8 diperoleh nilai R-squared (R^2) sebesar **0,800871** (80,08%) menunjukkan bahwa variabel Bantuan Sosial (X_1) dan Pertumbuhan Ekonomi (X_2) mempengaruhi variabel Kemiskinan (Y) sebesar 80,08% sedangkan sisanya $(100-80,08) = 19,92\%$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan

Bantuan sosial adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Salah satu penyaluran bantuan sosial yang dilakukan pemerintah yaitu adanya anggaran belanja bantuan sosial yang direalisasikan setiap tahun pada APBD dan APBN. Meskipun nominal dana bantuan sosial pada realisasi APBD dan APBN selalu tidak tetap atau selalu berubah setiap tahun namun hal ini menunjukkan pemerintah masih berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan hasil regresi pada penelitian ini diperoleh bahwa Bantuan Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Kota Tegal. Hal ini menunjukkan penyaluran dana bantuan sosial belum efektif hal ini mungkin disebabkan karena realisasi anggaran bantuan sosial tidak selalu sesuai yang dianggarkan atau penyaluran dana bantuan sosial tidak tepat sasaran. Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan Riksanta, H. K. P. (2017)^[16] yang berjudul “Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dana Bantuan sosial, dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan di provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2010-2014” yang menyatakan Belanja Bantuan Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

4.2.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznet dalam Tambunan (2014)^[8] memiliki korelasi yang kuat terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi pada tahap awal menyebabkan tingkat kemiskinan cenderung meningkat namun pada saat mendekati tahap akhir terjadi pengurangan tingkat kemiskinan secara berkesinambungan. Dengan demikian, dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Menurut Siregar (2008)^[3] Pertumbuhan ekonomi adalah syarat keharusan untuk mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitan ini dapat dijelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan tanda negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di kota Tegal. Hal ini menunjukkan Bahwa pertumbuhan ekonomi tidak efektif menurunkan kemiskinan. Seharusnya pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi yang kuat terhadap kemiskinan, sejatinya pembangunan ekonomi yang meningkat akan menurunkan tingkat kemiskinan, hal ini disebabkan karena pertumbuhan Ekonomi belum menyebar meyentuh golongan masyarakat miskin. Meskipun

pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan namun jika tidak diikuti sektor-sektor yang dipenuhi masyarakat miskin maka pertumbuhan ekonomi tidak akan mengurangi kemiskinan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Riksananta, H. K. P. (2017)^[16] dengan judul “Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dana Bantuan Sosial, dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan di provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2010-2014” yang menyatakan PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda negatif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

4.2.1 Pengaruh Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian uji F simultan diperoleh nilai probabilitas F-statistic 0,003523 ($<0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kota Tegal. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R-squared 0,800871 artinya variabel Bantuan Sosial (X_1) dan Pertumbuhan Ekonomi (X_2) mempengaruhi variabel Kemiskinan (Y) sebesar 80,08% sedangkan sisanya $(100-80,08) = 19,92\%$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan penelitian dan hasil pengolahan data bahwa bantuan Sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Tegal tahun 2010-2019. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0,097784, t-statistic 5,254928, dan nilai probabilitas sebesar 0,0012 ($<0,05$). Hal ini menunjukkan penyaluran Bantuan Sosial di Kota Tegal masih belum efektif dalam menurunkan kemiskinan di Kota Tegal.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengolahan data bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan menunjukkan tanda negatif terhadap kemiskinan di Kota Tegal. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar -0,244309, t-statistic -0,732748, dan nilai probabilitas sebesar 0,4875 ($<0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak efektif menurunkan kemiskinan di Kota Tegal.
- 3) Berdasarkan penelitian dan hasil pengolahan data bahwa Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Tegal. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,003523 ($< 0,05$) dan

- 4) berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa variabel Bantuan Sosial (X_1) dan Pertumbuhan Ekonomi (X_2) mempengaruhi variabel Kemiskinan (Y) sebesar 80,08% dan sisanya 19,92% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

A. Bagi Pemerintah

1. Pemerintah perlu mengawasi penyaluran Dana bantuan Sosial karena rentan terhadap permainan keuangan. Pemerintah harus lebih selektif untuk para pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyaluran Bantuan Sosial sehingga penyaluran bantuan efektif tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat menurunkan kemiskinan di Kota Tegal.
2. Disarankan pada pemerintah agar ikut membantu meningkatkan sektor-sektor perekonomian daerah agar pertumbuhan ekonomi meningkat, sehingga dapat menurunkan Kemiskinan di Kota Tegal.
3. Masyarakat harus memiliki kemampuan dan kemandirian dalam mengelola perekonomiannya agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga berperan dalam mngentaskan kemiskinan.
4. Bagi peneliti selanjutnya untuk terus menggali topik lebih luas dan relevan dalam penelitian ini, dan juga membaca penelitian terdahulu sebagai bahan bacaan dan perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1.] Badan Pusat Statistik, (2021). *Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020*. No 16/02/th.XXIV, 15 February 2021. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- [2.] Sukirno, Sadono, (2013). *Makroekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- [3.] Siregar, H. & Dwi, W. (2008). *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Dikutip dari http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/PROS_2008_MAK3.pdf. Diakses pada 19 Juni 2021.
- [4.] Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- [5.] World Bank, (2016). *Overview Poverty*. Dari <http://www.worldBank.org/en/topic/poverty/overview> Diakses pada 15 Juni 2021
- [6.] Todaro, M. P. & Stephen, C. S.(2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 1. Edisi 11. Alih Bahasa. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- [7.] Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. STIE YKPN. Yogyakarta.
- [8.] Tambunan, T.(2014). *Perekonomian Indonesia : Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [9.] Susanto, R dan Pangesty, I. (2020). Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia : *Jurnal Applied Bussines and Economics (JABE)* 7(2) : 271-278.
- [10.] Supriyanto, R. W., Ramadhani, e. R., & Rahmadan., E. (2014). *Perlindungan Sosial di Indonesia tantangan dan arah ke Depan*. Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat , Kementrian /Bappenas. https://www.Bappenas.go.id/files/5114/2889/4558/Perlindungan_Sosial_di_Indonesia_Tantangan_dan_Arah_kedepan.pdf. Diakses pada 25 Mei 2021.

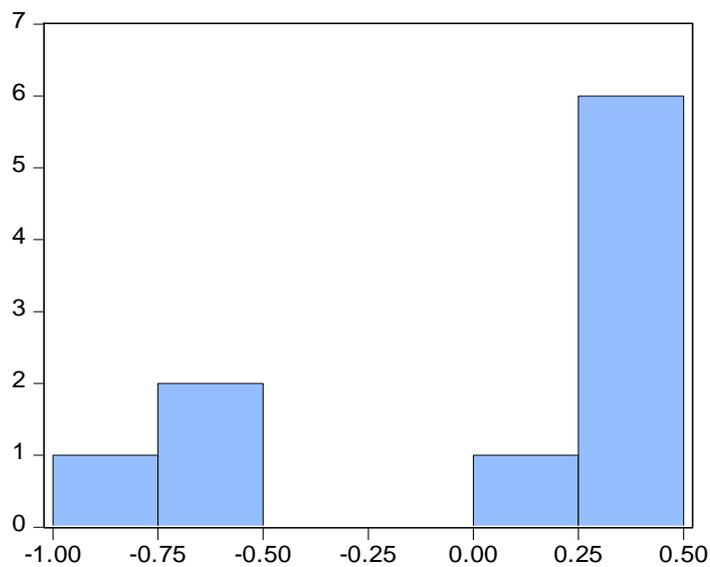
- [11.] Nuraniah, (2019). “Analisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Belanja Bantuan Sosial, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan : *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 2(1) : 63-75.
- [12.] Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [13.] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&D*. Cetakan Kedua puluh , Bandung : Alfabeta
- [14.] Priyatno, Duwi. (2014). *SPSS : 22 Pengolahan Data Praktis*. Yogyakarta: Andi.
- [15.] Bawono, A dan Shina, A.F.I. (2018). *Ekonometrika Terapan Untuk Ekonomi dan Bisnis Islam Aplikasi dengan Eviews*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga. Salatiga
- [16.] Riksananta, H. K. P. (2017). *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dana Bantuan sosial, dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan di provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2010-2014*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 100 hal. (Tidak Dipublikasikan)

LAMPIRAN

1. Data Penelitian

Tahun	Persentase Kemiskinan	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	Dana Bantuan Sosial (miliar)
2010	10,62	5,36	24,88
2011	10,81	6,47	27,79
2012	10,04	4,21	14,07
2013	8,84	5,67	17,95
2014	8,54	5,04	14,28
2015	8,26	5,45	0,69
2016	8,2	5,49	0,21
2017	8,11	5,95	0,17
2018	7,81	5,87	0,22
2019	7,47	5,77	3,58

2 Uji Normalitas



Series: Residuals
Sample 2010 2019
Observations 10

Mean 9.33e-16
Median 0.303525
Maximum 0.487569
Minimum -0.830188
Std. Dev. 0.531901
Skewness -0.724377
Kurtosis 1.729046

Jarque-Bera 1.547590
Probability 0.461259

3. Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 07/14/21 Time: 00:11
Sample: 2010 2019
Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.470975	95.42139	NA
BS	0.000346	2.026416	1.000000
PE	0.111166	94.39026	1.000000

4. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.206530	Prob. F(2,5)	0.2056
Obs*R-squared	4.688231	Prob. Chi-Square(2)	0.0959

Test Equation:

Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 07/14/21 Time: 00:08
Sample: 2010 2019
Included observations: 10
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.435364	1.629731	0.267139	0.8000
BS	0.007235	0.016773	0.431357	0.6842
PE	-0.088884	0.292298	-0.304087	0.7733
RESID(-1)	0.464427	0.382356	1.214645	0.2787
RESID(-2)	-0.767626	0.391973	-1.958361	0.1075
R-squared	0.468823	Mean dependent var		9.33E-16
Adjusted R-squared	0.043882	S.D. dependent var		0.531901
S.E. of regression	0.520100	Akaike info criterion		1.837260
Sum squared resid	1.352518	Schwarz criterion		1.988552
Log likelihood	-4.186300	Hannan-Quinn criter.		1.671292
F-statistic	1.103265	Durbin-Watson stat		2.265963
Prob(F-statistic)	0.446652			

5. Uji Heterokedasitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.465235	Prob. F(2,7)	0.6461
Obs*R-squared	1.173285	Prob. Chi-Square(2)	0.5562
Scaled explained SS	0.209568	Prob. Chi-Square(2)	0.9005

6. Analisis Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: TK
 Method: Least Squares
 Date: 07/14/21 Time: 00:25
 Sample: 2010 2019
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.205156	1.863055	4.940892	0.0017
BS	0.097784	0.018608	5.254928	0.0012
PE	-0.244309	0.333415	-0.732748	0.4875
R-squared	0.800871	Mean dependent var		8.870000
Adjusted R-squared	0.743977	S.D. dependent var		1.191964
S.E. of regression	0.603119	Akaike info criterion		2.069920
Sum squared resid	2.546266	Schwarz criterion		2.160696
Log likelihood	-7.349600	Hannan-Quinn criter.		1.970339
F-statistic	14.07652	Durbin-Watson stat		1.351834
Prob(F-statistic)	0.003523			

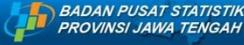
7. Hasil Uji F

R-squared	0.800871	Mean dependent var	8.870000
Adjusted R-squared	0.743977	S.D. dependent var	1.191964
S.E. of regression	0.603119	Akaike info criterion	2.069920
Sum squared resid	2.546266	Schwarz criterion	2.160696
Log likelihood	-7.349600	Hannan-Quinn criter.	1.970339
F-statistic	14.07652	Durbin-Watson stat	1.351834
Prob(F-statistic)	0.003523		

8 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.205156	1.863055	4.940892	0.0017
BS	0.097784	0.018608	5.254928	0.0012
PE	-0.244309	0.333415	-0.732748	0.4875

9. Kemiskinan di Kota Tegal Tahun 2010-2019

MENU  Data BPS

Data Series: [2018-2020](#) [2015-2017](#) [2012-2014](#) [2009-2011](#) [2006-2008](#) [2003-2005](#) [1996-2002](#)

Search:

Kabupaten / Kota	Kemiskinan								
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)			Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (persen)		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Kota Tegal	248 173,00	270 788,00	280 349,00	23,40	25,70	25,90	9,88	10,62	10,81

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 36 total entries)

an statistik, mohon partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner SKD 2021 berikut ini : <http://s.bps.g>

MENU  Data BPS

Data Series: [2018-2020](#) [2015-2017](#) [2012-2014](#) [2009-2011](#) [2006-2008](#) [2003-2005](#) [1996-2002](#)

Search:

Kabupaten / Kota	Kemiskinan								
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)			Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (persen)		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Kota Tegal	305 818,00	333 553,00	353 301,00	24,00	21,60	20,90	10,04	8,84	8,54

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 36 total entries)

sebagai bentuk kewaspadaan terhadap resiko penyebaran covid-19, layanan pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST)

MENU  Data BPS

Data Series: [2018-2020](#) [2015-2017](#) [2012-2014](#) [2009-2011](#) [2006-2008](#) [2003-2005](#) [1996-2002](#)

Search:

Kabupaten / Kota	Kemiskinan								
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)			Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (persen)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kota Tegal	455 488,00	465 047,00	502 031,00	19,40	18,60	19,50	7,81	7,47	7,80

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 36 total entries)

ne melalui email jateng@bps.go.id dengan subject Permintaan Data, whatsapp di nomor : 0895-4043-53535, atau zc

10. Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tegal Tahun 2010-2019

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tegal Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2010 - 2020
Growth Rate of GRDP of Tegal Municipality at 2010 Constant Market Price by Industry (Percent), 2010 - 2020

Kategori Industry Code	Uraian Description	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	4,67	3,90	1,75	3,33	(1,87)	2,68	3,59	3,54	4,15	4,08
B	Pertambangan dan Pengalihan/ Mining and Quarrying	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	3,15	11,58	6,34	10,19	7,48	6,15	5,02	6,01	4,68	4,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	8,00	3,10	5,21	3,36	3,18	0,76	9,89	6,14	4,95	5,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0,76	0,96	(10,60)	0,12	3,03	1,63	1,79	2,19	3,26	3,88
F	Konstruksi/ Construction	10,17	0,81	6,17	3,62	3,46	6,00	6,05	6,23	6,02	5,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	6,95	10,04	1,07	5,20	4,43	4,14	4,61	5,19	5,26	5,39
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	6,57	2,19	4,21	7,58	17,05	9,20	6,21	6,09	6,65	7,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	3,70	5,29	6,74	7,67	7,56	7,08	8,97	7,08	7,27	7,78
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	1,10	4,46	8,60	6,27	6,60	6,53	6,35	11,68	12,30	10,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	1,59	2,81	3,93	2,97	1,88	5,59	6,54	4,57	4,23	4,20
L	Real Estate/ Real Estate Activities	1,30	4,34	2,31	5,99	5,43	6,10	6,06	5,80	5,25	5,32
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	5,61	11,39	11,46	12,77	9,69	8,01	6,74	8,99	8,95	9,87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1,89	1,94	(0,25)	2,61	(1,61)	4,56	4,04	3,04	3,01	4,12
P	Jasa Pendidikan/ Education	3,54	20,22	17,15	7,95	9,75	7,08	6,60	7,48	7,49	6,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	2,38	9,13	12,04	7,44	13,29	7,05	6,17	7,32	9,14	7,24
R,S,T,U	Jasa lainnya/ Other Services Activities	0,60	2,07	3,43	5,65	8,36	3,21	5,89	6,28	5,88	7,89
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT		5,36	6,47	4,21	5,67	5,04	5,45	5,49	5,95	5,87	5,77
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT WITHOUT OIL		5,36	6,47	4,21	5,67	5,04	5,45	5,49	5,95	5,87	5,77

11. Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada APBD Kota Tegal Tahun 2010-2019

1	APBD 2010			
2	Kota Tegal			
3	Data per 20 Juli 2010 (Anggaran)			
4	Akun	Anggaran	Realisasi	%
5	Pendapatan	398.091.243.000,00	460.931.044.657,00	115,79 %
6				
7	PAD	79.132.956.000,00	101.321.867.412,00	128,04 %
8				
9	Pajak daerah	11.089.340.000,00	13.100.645.761,00	118,14 %
10				
11	Retribusi daerah	10.964.448.000,00	9.577.857.963,00	87,35 %
12				
13	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	723.683.000,00	675.280.427,00	93,31 %
14	Lain-lain PAD yang sah	56.355.485.000,00	77.968.083.261,00	138,35 %
15				
16	Daper	292.125.415.000,00	296.502.755.004,00	101,50 %
17				
18	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	22.855.097.000,00	27.232.437.004,00	119,15 %
19				
20	Dana alokasi umum	244.580.618.000,00	244.580.618.000,00	100,00 %
21				
22	Dana alokasi khusus	24.689.700.000,00	24.689.700.000,00	100,00 %
23				
24	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	26.832.872.000,00	63.106.422.241,00	235,18 %
25				
26	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lain	14.669.431.000,00	15.839.172.199,00	107,97 %
27				
28	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0,00	34.979.039.042,00	-
29				
30	Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	12.163.441.000,00	0,00	0,00 %
31				
32	Lain-lain	0,00	12.288.211.000,00	-
33				
34	Belanja	454.854.968.000,00	474.360.687.266,00	104,29 %
35				
36	Belanja Tidak Langsung	261.914.346.000,00	290.865.665.088,00	111,05 %
37				
38	Belanja Pegawai	211.347.553.000,00	258.564.900.447,00	122,34 %
39				
40	Belanja Bunga	272.488.000,00	272.487.184,00	100,00 %
41				
42	Belanja Hibah	21.475.249.000,00	6.562.511.000,00	30,56 %
43				
44	Belanja Bantuan sosial	26.195.056.000,00	24.880.488.057,00	94,98 %
45				
46	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan	624.000.000,00	536.078.400,00	85,91 %
47				
48	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	49.200.000,00	2,46 %
49				
50	Belanja Langsung	192.940.622.000,00	183.495.022.178,00	95,10 %
51				
52	Belanja Pegawai	28.768.925.000,00	0,00	0,00 %
53				
54				
55				
56				

1	APBD 2011			
2	Kota Tegal			
3	Data per 5 Juli 2011 (Anggaran) dan 4 Nov 2010 (Realisasi)			
4	Akun	Anggaran	Realisasi	%
5	Pendapatan	440.674.344.000,00	547.717.521.845,00	124,29 %
6				
7	PAD	94.465.114.000,00	117.244.290.641,00	124,11 %
8				
9	Pajak daerah	16.162.912.000,00	20.891.263.399,00	129,25 %
10				
11	Retribusi daerah	11.977.000.000,00	14.112.315.105,00	117,83 %
12				
13	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.457.121.000,00	1.930.051.843,00	132,46 %
14	Lain-lain PAD yang sah	64.868.081.000,00	80.310.660.294,00	123,81 %
15				
16	Daper	312.195.516.000,00	312.561.579.536,00	100,12 %
17				
18	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	22.984.952.000,00	23.509.993.536,00	102,28 %
19				
20	Dana alokasi umum	265.641.464.000,00	265.483.086.000,00	99,94 %
21				
22	Dana alokasi khusus	23.569.100.000,00	23.568.500.000,00	100,00 %
23				
24	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	34.013.714.000,00	117.911.651.668,00	346,66 %
25				
26	Hibah	1.040.000.000,00	1.028.000.000,00	98,85 %
27				
28	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda	15.025.175.000,00	21.926.193.788,00	145,93 %
29				
30	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0,00	74.752.623.880,00	-
31				
32	Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lain	17.948.539.000,00	0,00	0,00 %
33				
34	Lain-lain	0,00	20.204.834.000,00	-
35				
36	Belanja	518.175.235.000,00	572.009.660.567,00	110,39 %
37				
38	Belanja Tidak Langsung	264.839.200.000,00	338.093.580.314,00	127,66 %
39				
40	Belanja Pegawai	232.825.582.000,00	299.288.918.618,00	128,55 %
41				
42	Belanja Bunga	228.904.000,00	228.903.564,00	100,00 %
43				
44	Belanja Hibah	7.729.570.000,00	10.245.601.350,00	132,55 %
45				
46	Belanja Bantuan sosial	21.431.144.000,00	27.794.146.582,00	129,69 %
47				
48	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota	624.000.000,00	536.010.200,00	85,90 %
49				
50	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	0,00	0,00 %
51				
52	Belanja Langsung	253.336.035.000,00	233.916.080.253,00	92,33 %
53				
54	Belanja Pegawai	33.343.334.000,00	0,00	0,00 %
55				
56				

A	B	C	D	E
1	APBD 2012			
2	Kota Tegal			
3	Data per 29 Mei 2012 (Anggaran) dan 4 November 2016 (Realisasi)			
4	Akun	Anggaran	Realisasi	%
5	Pendapatan	591.094.793.000,00	650.805.263.874,00	110,10 %
6				
7	PAD	117.210.496.000,00	156.663.027.896,00	133,66 %
8				
9	Pajak daerah	22.866.889.000,00	29.255.081.307,00	127,94 %
10				
11	Retribusi daerah	16.555.391.000,00	19.825.520.624,00	119,75 %
12				
13	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.028.546.000,00	4.570.754.244,00	225,32 %
14				
15	Lain-lain PAD yang sah	75.759.670.000,00	103.011.671.721,00	135,97 %
16				
17	Daper	388.858.327.000,00	394.762.935.687,00	101,52 %
18				
19	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	23.484.557.000,00	29.389.100.687,00	125,14 %
20				
21	Dana alokasi umum	334.819.000.000,00	334.819.065.000,00	100,00 %
22				
23	Dana alokasi khusus	30.554.770.000,00	30.554.770.000,00	100,00 %
24				
25	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	85.025.970.000,00	99.379.300.291,00	116,88 %
26				
27	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	16.037.209.000,00	30.593.129.291,00	190,76 %
28				
29	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	57.787.852.000,00	54.384.462.000,00	94,11 %
30				
31	Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	11.200.909.000,00	0,00	0,00 %
32				
33	Lain-lain	0,00	14.401.709.000,00	-
34				
35	Belanja	600.014.688.000,00	586.687.294.770,00	97,78 %
36				
37	Belanja Tidak Langsung	323.593.897.000,00	357.607.747.630,00	110,51 %
38				
39	Belanja Pegawai	291.296.000.000,00	338.011.092.458,00	116,04 %
40				
41	Belanja Bunga	185.798.000,00	185.797.572,00	100,00 %
42				
43	Belanja Hibah	6.674.537.000,00	4.652.879.400,00	69,71 %
44				
45	Belanja Bantuan sosial	22.813.562.000,00	14.065.400.500,00	61,65 %
46				
47	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pem	624.000.000,00	536.010.200,00	85,90 %
48				
49	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	156.567.500,00	7,83 %
50				
51	Belanja Langsung	276.420.791.000,00	229.079.547.140,00	82,87 %
52				
53	Belanja Pegawai	38.407.820.000,00	0,00	0,00 %
54				

A	B	C	D	E
1	APBD 2013			
2	Kota Tegal			
3	Data per 15 Juli 2013 (Anggaran) dan 21 Oktober 2016 (Realisasi)			
4	Akun	Anggaran	Realisasi	%
5	Pendapatan	647.638.912.000,00	723.968.861.085,00	111,79 %
6				
7	PAD	148.201.545.000,00	176.377.335.075,00	119,01 %
8				
9	Pajak daerah	35.304.432.000,00	41.068.021.468,00	116,33 %
10				
11	Retribusi daerah	17.450.250.000,00	21.953.079.533,00	125,80 %
12				
13	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.062.293.000,00	2.080.042.469,00	100,86 %
14				
15	Lain-lain PAD yang sah	93.384.570.000,00	111.276.191.605,00	119,16 %
16				
17	Daper	420.018.630.000,00	430.499.302.526,00	102,50 %
18				
19	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	15.844.720.000,00	29.817.134.526,00	188,18 %
20				
21	Dana alokasi umum	370.643.000.000,00	370.642.983.000,00	100,00 %
22				
23	Dana alokasi khusus	33.530.910.000,00	30.039.185.000,00	89,59 %
24				
25	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	79.418.737.000,00	117.092.223.484,00	147,44 %
26				
27	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	23.034.275.000,00	27.267.200.980,00	118,38 %
28				
29	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	56.384.462.000,00	74.069.104.000,00	131,36 %
30				
31	Lain-lain	0,00	15.755.918.504,00	-
32				
33	Belanja	690.948.300.000,00	673.040.144.370,00	97,41 %
34				
35	Belanja Tidak Langsung	355.422.857.000,00	395.666.490.138,00	111,32 %
36				
37	Belanja Pegawai	329.209.000.000,00	366.337.129.531,00	111,28 %
38				
39	Belanja Bunga	141.737.000,00	141.736.324,00	100,00 %
40				
41	Belanja Hibah	13.220.787.000,00	10.704.605.683,00	80,97 %
42				
43	Belanja Bantuan sosial	10.315.322.000,00	17.947.008.400,00	173,98 %
44				
45	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pen	536.011.000,00	536.010.200,00	100,00 %
46				
47	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	0,00	0,00 %
48				
49	Belanja Langsung	335.525.443.000,00	277.373.654.232,00	82,67 %
50				
51	Belanja Pegawai	40.059.443.000,00	0,00	0,00 %
52				

A	B	C	D	E
1	APBD 2014			
2	Kota Tegal			
3	Data per Oktober 2014 (Anggaran) dan 21 Oktober 2016 (Realisasi)			
4	Akun	Anggaran	Realisasi	%
5	Pendapatan	640.280.149.000,00	818.667.346.500,00	127,86 %
6				
7	PAD	166.142.904.000,00	241.938.166.929,00	145,62 %
8				
9	Pajak daerah	36.188.427.000,00	46.673.112.577,00	128,97 %
10				
11	Retribusi daerah	18.006.435.000,00	22.863.092.866,00	126,97 %
12				
13	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.080.042.000,00	3.746.306.371,00	180,11 %
14				
15	Lain-lain PAD yang sah	109.868.000.000,00	168.653.655.115,00	153,51 %
16				
17	Daper	449.283.705.000,00	437.444.087.261,00	97,36 %
18				
19	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	27.972.355.000,00	23.777.788.261,00	85,00 %
20				
21	Dana alokasi umum	390.733.000.000,00	390.732.536.000,00	100,00 %
22				
23	Dana alokasi khusus	30.578.350.000,00	22.933.763.000,00	75,00 %
24				
25	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	24.853.540.000,00	139.287.092.310,00	560,43 %
26				
27	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lain	24.853.540.000,00	38.955.789.000,00	156,74 %
28				
29	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0,00	80.187.195.000,00	-
30				
31	Lain-lain	0,00	20.144.108.310,00	-
32				
33	Belanja	708.507.019.000,00	783.099.149.188,00	110,53 %
34				
35	Belanja Tidak Langsung	339.584.160.000,00	431.657.191.765,00	127,11 %
36				
37	Belanja Pegawai	307.639.000.000,00	401.221.736.362,00	130,42 %
38				
39	Belanja Bunga	98.154.000,00	98.152.703,00	100,00 %
40				
41	Belanja Hibah	15.235.625.000,00	15.478.660.000,00	101,60 %
42				
43	Belanja Bantuan sosial	14.075.370.000,00	14.276.408.700,00	101,43 %
44				
45	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pe	536.011.000,00	582.234.000,00	108,62 %
46				
47	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	0,00	0,00 %
48				
49	Belanja Langsung	368.922.859.000,00	351.441.957.423,00	95,26 %
50				
51	Belanja Pegawai	40.661.859.000,00	0,00	0,00 %
52				

A	B	C	D	E
1	APBD 2015			
2	Kota Tegal			
3	Data per April 2015 (Anggaran) dan 4 Juli 2017			
4	Akun	Anggaran	Realisasi	%
5	Pendapatan	837.590.467.000,00	947.468.621.453,00	113,12 %
6				
7	PAD	229.574.943.000,00	271.601.407.419,00	118,31 %
8				
9	Pajak daerah	43.222.543.000,00	48.409.198.815,00	112,00 %
10				
11	Retribusi daerah	16.429.094.000,00	17.372.233.365,00	105,74 %
12				
13	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.746.306.000,00	3.474.818.598,00	92,75 %
14				
15	Lain-lain PAD yang sah	166.177.000.000,00	202.345.156.641,00	121,76 %
16				
17	Daper	470.019.435.000,00	500.849.967.265,00	106,56 %
18				
19	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	24.967.345.000,00	20.641.047.265,00	82,67 %
20				
21	Dana alokasi umum	405.831.000.000,00	405.831.088.000,00	100,00 %
22				
23	Dana alokasi khusus	39.221.090.000,00	74.377.832.000,00	189,64 %
24				
25	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	137.996.089.000,00	175.017.246.769,00	126,83 %
26				
27	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	38.955.789.000,00	49.729.703.769,00	127,66 %
28				
29	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	94.704.427.000,00	94.438.327.000,00	99,72 %
30				
31	Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	4.335.873.000,00	0,00	0,00 %
32				
33	Lain-lain	0,00	30.849.216.000,00	-
34				
35	Belanja	958.138.372.000,00	959.420.548.451,00	100,13 %
36				
37	Belanja Tidak Langsung	435.251.015.000,00	411.849.938.505,00	94,62 %
38				
39	Belanja Pegawai	427.870.000.000,00	406.055.037.063,00	94,90 %
40				
41	Belanja Bunga	54.571.000,00	54.569.082,00	100,00 %
42				
43	Belanja Hibah	3.892.840.000,00	4.472.192.500,00	114,88 %
44				
45	Belanja Bantuan sosial	746.920.000,00	690.874.460,00	92,50 %
46				
47	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pe	686.684.000,00	577.265.400,00	84,07 %
48				
49	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	0,00	0,00 %
50				
5				

A	B	C	D	E
1	APBD 2016			
2	Kota Tegal			
3	Data per Februari 2017 (Anggaran dan 11 Okt 2018 (Realisasi)			
4	Akum	Anggaran	Realisasi	%
5	Pendapatan	1.032.686.389.000,00	1.051.120.913.170,00	101,79 %
6				
7	PAD	258.668.643.000,00	287.343.472.844,00	111,09 %
8				
9	Pajak daerah	48.736.351.000,00	53.623.297.052,00	110,03 %
10				
11	Retribusi daerah	20.710.183.000,00	21.139.576.934,00	102,07 %
12				
13	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.746.306.000,00	3.992.598.857,00	106,57 %
14				
15	Lain-lain PAD yang sah	185.475.803.000,00	208.588.000.000,00	112,46 %
16				
17	Daper	636.166.657.000,00	688.199.100.468,00	108,18 %
18				
19	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	25.264.986.000,00	31.599.100.468,00	125,07 %
20				
21	Dana alokasi umum	490.772.001.000,00	490.772.000.000,00	100,00 %
22				
23	Dana alokasi khusus	120.129.670.000,00	165.828.000.000,00	138,04 %
24				
25	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	137.851.089.000,00	75.578.339.858,00	54,83 %
26				
27	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lain	38.955.789.000,00	50.059.972.858,00	128,50 %
28				
29	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	94.704.427.000,00	0,00	0,00 %
30				
31	Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lain	4.190.873.000,00	25.017.000.000,00	596,94 %
32				
33	Lain-lain	0,00	501.367.000,00	-
34				
35	Belanja	1.133.323.560.000,00	1.074.738.579.562,00	94,83 %
36				
37	Belanja Tidak Langsung	470.637.246.000,00	425.806.579.562,00	90,47 %
38				
39	Belanja Pegawai	456.622.966.000,00	413.071.000.000,00	90,46 %
40				
41	Belanja Bunga	22.352.000,00	10.985.462,00	49,15 %
42				
43	Belanja Hibah	10.955.244.000,00	11.775.132.600,00	107,48 %
44				
45	Belanja Bantuan sosial	350.000.000,00	211.500.000,00	60,43 %
46				
47	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemda	686.684.000,00	656.961.500,00	95,67 %
48				
49	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	81.000.000,00	4,05 %
50				
51	Belanja Langsung	662.686.314.000,00	648.932.000.000,00	97,92 %
52				
53	Belanja Pegawai	29.875.668.000,00	0,00	0,00 %
54				

A	B	C	D	E	F
1	APBD 2017				
2	Kota Tegal				
3	Data per 26 Mei 2017 (Anggaran dan 12 November 2018 (Realisasi)				
4	Akum	Anggaran	Realisasi	%	
5	Pendapatan	1.028.723.028.000,00	1.024.765.938.277,00	99,62 %	
6					
7	PAD	281.841.490.000,00	306.830.656.135,00	108,87 %	
8					
9	Pajak daerah	53.768.120.000,00	69.042.455.743,00	128,41 %	
10					
11	Retribusi daerah	23.669.670.000,00	19.857.864.056,00	83,90 %	
12					
13	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.479.751.000,00	14.707.658.210,00	422,66 %	
14					
15	Lain-lain PAD yang sah	200.923.949.000,00	203.222.678.126,00	101,14 %	
16					
17	Daper	696.611.835.000,00	644.940.136.542,00	92,58 %	
18					
19	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	36.899.467.000,00	29.186.187.399,00	79,53 %	
20					
21	Dana alokasi umum	490.772.001.000,00	482.150.715.000,00	98,24 %	
22					
23	Dana alokasi khusus	169.140.367.000,00	133.603.234.143,00	78,99 %	
24					
25	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	50.269.703.000,00	72.995.145.600,00	145,21 %	
26					
27	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	49.729.703.000,00	53.574.777.000,00	107,73 %	
28					
29	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	5.000.000,00	0,00	0,00 %	
30					
31	Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	0,00	19.420.368.600,00	-	
32					
33	Belanja	1.160.919.453.000,00	1.017.223.991.908,00	88,38 %	
34					
35	Belanja Tidak Langsung	456.971.175.000,00	397.848.380.523,00	87,06 %	
36					
37	Belanja Pegawai	429.949.266.000,00	383.349.873.023,00	89,16 %	
38					
39	Belanja Hibah	23.985.225.000,00	13.563.884.500,00	56,55 %	
40					
41	Belanja Bantuan sosial	350.000.000,00	165.000.000,00	47,14 %	
42					
43	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemda	686.684.000,00	686.678.600,00	100,00 %	
44					
45	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	82.944.400,00	4,15 %	
46					
47	Belanja Langsung	693.948.278.000,00	619.375.611.385,00	89,25 %	
48					
49	Belanja Pegawai	38.929.730.000,00	0,00	0,00 %	
50					

A	B	C	D	E
1	APBD 2018 dan Realisasi APBD 2018			
2	Kota Tegal			
3	Anggaran Murni dan Realisasi APBD TA 2018 per 10 September 2020			
4	Akum	Anggaran	Realisasi	%
5	Pendapatan	989.073.097.000,00	987.244.236.619,00	99,82 %
6				
7	PAD	298.131.841.000,00	275.021.448.594,00	92,25 %
8				
9	Pajak daerah	66.407.133.000,00	83.852.211.209,00	126,27 %
10				
11	Retribusi daerah	21.368.509.000,00	17.402.002.890,00	81,44 %
12				
13	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.393.987.000,00	3.530.831.162,00	104,03 %
14				
15	Lain-lain PAD yang sah	206.362.212.000,00	170.236.403.333,00	82,25 %
16				
17	Daper	640.431.553.000,00	602.567.259.359,00	94,09 %
18				
19	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	33.590.225.000,00	25.571.473.848,00	76,13 %
20				
21	Dana alokasi umum	482.150.715.000,00	482.150.715.000,00	100,00 %
22				
23	Dana alokasi khusus	124.690.613.000,00	94.845.070.521,00	76,06 %
24				
25	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	50.509.703.000,00	109.655.528.656,00	217,10 %
26				
27	Hibah	0,00	27.015.013.112,00	-
28				
29	Dana darurat	0,00	0,00	-
30				
31	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	49.729.703.000,00	66.092.844.949,00	132,90 %
32				
33	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0,00	0,00	-
34				
35	Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	780.000.000,00	16.547.670.595,00	2.121,50 %
36				
37	Lain-lain	0,00	0,00	-
38				
39	Belanja	1.089.919.641.000,00	916.730.788.800,00	84,11 %
40				
41	Belanja Tidak Langsung	479.544.488.000,00	391.820.150.217,00	81,71 %
42				
43	Belanja Pegawai	453.099.543.000,00	375.579.236.296,00	82,89 %
44				
45	Belanja Bunga	0,00	0,00	-
46				
47	Belanja Subsidi	0,00	0,00	-
48				
49	Belanja Hibah	23.408.261.000,00	15.282.746.721,00	65,29 %
50				
51	Belanja Bantuan sosial	350.000.000,00	215.000.000,00	61,43 %
52				
53	Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	0,00	0,00	-
54				
55	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	686.684.000,00	650.967.200,00	94,80 %
56				
57	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	92.200.000,00	4,61 %
58				
59	Belanja Langsung	610.375.153.000,00	524.910.638.583,00	86,00 %
60				
61	Belanja Pegawai	106.362.477.000,00	0,00	0,00 %
62				

A	B	C	D	E
1	Realisasi APBD 2019			
2	Kota Tegal			
3	Realisasi APBD 2019 (per 21 Oktober 2020)			
4	Akum	Anggaran	Realisasi	%
5	Pendapatan	1.043.810.057.000,00	1.036.983.763.529,00	99,36 %
6				
7	PAD	297.677.322.000,00	285.575.788.984,00	95,93 %
8				
9	Pajak daerah	77.550.464.000,00	89.361.925.371,00	115,23 %
10				
11	Retribusi daerah	23.700.141.000,00	19.087.354.255,00	80,54 %
12				
13	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipis	3.747.587.000,00	8.575.641.316,00	228,83 %
14				
15	Lain-lain PAD yang sah	192.679.130.000,00	168.550.868.042,00	87,48 %
16				
17	Daper	664.378.158.000,00	641.682.768.016,00	96,58 %
18				
19	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	25.452.966.000,00	18.911.295.500,00	74,30 %
20				
21	Dana alokasi umum	502.969.026.000,00	502.969.026.000,00	100,00 %
22				
23	Dana alokasi khusus	135.956.166.000,00	119.802.446.516,00	88,12 %
24				
25	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	81.614.577.000,00	109.705.206.528,00	134,42 %
26				
27	Hibah	27.259.800.000,00	28.091.568.988,00	103,05 %
28				
29	Dana darurat	0,00	0,00	-
30				
31	Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda	53.574.777.000,00	58.813.352.605,00	111,64 %
32				
33	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0,00	0,00	-
34				
35	Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda	1780.000.000,00	21.800.284.936,00	2.704,91 %
36				
37	Lain-lain	0,00	0,00	-
38				
39	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	-
40				
41	Belanja	1.120.465.803.000,00	1.046.575.212.898,00	93,41 %
42				